

# **DINAMIKA KOALISI PARTAI POLITIK DI TINGKAT LOKAL: STUDI KASUS KOALISI PDIP-PKB DALAM PEMILUKADA KOTA PEKALONGAN TAHUN 2015**

**Yosef Evan Danar Aditama – 14010115130063**

Evandandar24@gmail.com

Dosen Pembimbing : **Hendra Try Ardianto, S.IP, M.A**

htardianto@live.undip.ac.id

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

## **INTISARI**

Koalisi partai politik di Indonesia di tingkat lokal atau daerah seringkali tidak sejalan dengan koalisi yang ada di tingkat pusat. Fenomena ini menjadikan bahwa koalisi partai politik ini cenderung memiliki sifat pragmatis dan kurang memperhatikan aspek ideologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan tujuan untuk mengetahui secara mendalam dan komprehensif mengenai dinamika koalisi PDIP-PKB dalam Pilkada Kota Pekalongan tahun 2015 serta pengaruh koalisi terhadap strategi yang dilakukan dalam pemilu tersebut.

Berdasarkan dinamika koalisi yang terjadi antara PDIP dan PKB, penelitian ini menemukan bahwa koalisi ini termasuk ke dalam kategorisasi Koalisi Kecil Pragmatis (KKP). Hasil dari penelitian ini mencoba mengkritisi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Luthfi Makhasin tentang Orientasi Ideologis dan Pragmatisme Politik dalam Model Pembentukan Koalisi pada Pilkada Jawa Tengah tahun 2015 yang menyebutkan bahwa Koalisi PDIP-PKB pada Pilkada Kota Pekalongan tahun 2015 masuk ke dalam kelompok koalisi Kecil Ideologis (KKI). Kemudian pada rumusan masalah lain peneliti menemukan keterkaitan mengenai pengaruh koalisi terhadap strategi. Koalisi PDIP-PKB mengusung pasangan calon Alex-Sae untuk menumbangkan partai Golkar. Melihat kekuatan pak Alex yang memiliki popularitas dan finansial yang dia miliki, koalisi PDIP-PKB mengambil langkah strategi ofensif memperluas pasar. Namun koalisi ini tidak terlalu berpengaruh terhadap strategi defensif, dikarenakan PDIP dan PKB memiliki basis massa yang jelas.

## **KATA KUNCI**

Koalisi Partai, Strategi Politik, Pilkada.

## Pendahuluan

**D**alam Penelitian ini akan membahas mengenai Dinamika Koalisi Partai Politik di Tingkat Lokal : Studi Kasus Koalisi PDIP-PKB dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015. Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Pekalongan tahun 2015, merupakan pertama kalinya dalam sejarah Kota Pekalongan diadakannya pilkada serentak dalam pemilihan kepala daerah Kota Pekalongan. Pasangan calon tersebut antara lain (KPU Kota Pekalongan, 2015a), yakni :

1. Drs. H.A Hakam Naja, M.Si dan Dra. Nur Chasanah, M.Si (diusung dari PAN dan Partai Gerindra)
2. H. Achmad Alf Arslan Djunaid, SE dan H.M Saelany Mahfudz, SE (PDI Perjuangan dan PKB)
3. Dr. H. Dwi Heri Wibawa, M. Kes dan Ir. H. Sutarip Tulis Widodo, M. Si (Partai Golkar)
4. Sudjaka Martana, SIP dan Fauzi Umar Lahji, SE (Perseorangan)

Berdasarkan sumber dari KPU Kota Pekalongan, dari keempat pasangan calon yang telah mendaftar dalam pemilihan umum kepala daerah Kota Pekalongan tahun 2015, terdapat satu pasangan calon yang tidak lolos tahap verifikasi oleh KPU. Pasangan calon tersebut adalah Sudjaka Martana dan Fauzi Umar Lahji yang maju dari perseorangan atau non-partai. Hal ini disebabkan karena mereka tidak mengembalikan dokumen perbaikan dalam tahap verifikasi. Dari perolehan suara terbanyak didapatkan oleh pasangan H. Achmad Alf Arslan Djunaid, SE dan H. M Saelany Mahfudz, SE sebanyak 46,69% suara.

Koalisi yang terbentuk antara PDIP dan PKB Kota Pekalongan merupakan hasil dari gabungan partai politik dalam rangka memenuhi persyaratan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas UU No.1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No.1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh minimal 20% kursi DPRD atau 25% perolehan suara sah pada pemilu DPRD. Dan berdasarkan ketentuan kebijakan itulah PDIP dan PKB berkoalisi. Kursi PDIP di DPRD kota Pekalongan sebesar 4 kursi, sedangkan PKB hanya mendapat 3 kursi.

Diketahui bahwa mereka berdua diusung oleh partai PDIP dan PKB. Kedua Partai tersebut merupakan partai yang bisa dibilang partai yang cukup besar di Pekalongan. Jika dilihat dari peta sosial masyarakat pekalongan mayoritas beragama Islam, golongan dengan aliran NU dan Muhammadiyah. Hal ini berdampak juga pada perkembangan peta politik di Pekalongan. Sebagai partai basis massa, Partai Kebangkitan Bangsa di Pekalongan menjadi salah satu partai basis massa yang cukup besar. Hal ini didukung dengan pernah adanya Mukhtamar V PBNU di Pekalongan tahun 1930(Waskitoadi, 2017, p. 47). Artinya bahwa banyaknya penganut NU di Pekalongan juga menjadi pertimbangan mengapa Mukhtamar V bisa diselenggarakan di Pekalongan. Dan diketahui berdasarkan hasil pemilu legislatif untuk DPRD Kota Pekalongan periode 2019-2024 PKB memiliki peningkatan drastis sehingga jumlah kursi DPRD sekarang untuk fraksi PKB sebanyak 7 kursi.

Fenomena koalisi antar partai politik ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Laver dan Back, bahwa pengelompokan ideologis dan kecenderungan perilaku partai politik merupakan indikator yang dapat dikaji dalam pembentukan koalisi di pemilihan umum langsung di Indonesia. Indikator ini didasarkan atas dua poin yakni ukuran atau keanggotaan dan orientasinya atas kekuasaan. Apabila dilihat dari sisi ukuran atau keanggotaan, koalisi terdiri dari koalisi kecil dan besar, sedangkan jika kita lihat dari sisi orientasi atas kekuasaan, partai politik di Indonesia dibagi dalam kategori partai ideologis dan pragmatis. Dari pengelompokan-pengelompokan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada empat tipe pembentukan koalisi partai politik, yaitu koalisi kecil-ideologis, koalisi kecil-pragmatis, koalisi besar-ideologis, dan koalisi besar-pragmatis(Makhasin, 2016, p. 239). Berdasarkan dari empat tipologi/tipe pembentukan koalisi partai politik di atas, bisa memengaruhi strategi politik yang akan dilakukan.

Berdasarkan penyelenggaraan pemilu serentak pada tahun 2015, koalisi yang terjadi antara partai politik bisa dikatakan sangatlah cair sehingga kemajemukan dalam satu koalisi setiap daerah sangat berbeda-beda. Catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 dan 2017, rasionalitas dalam pembentukan koalisi di tingkat lokal seringkali tidak mempertimbangkan koalisi di atasnya, baik di provinsi maupun di pusat. Artinya, koalisi level pilkada serentak adalah model koalisi “campur”. Dari fenomena tersebut koalisi antara partai politik di tingkat lokal bisa dibayangkan bahwasanya koalisi tersebut tidak terlalu melihat garis ideologi dan platform partai yang ada di tataran pusat, namun lebih kepada bagaimana perebutan kekuasaan yang cenderung pragmatis, tidak kurang tidak lebih (Frendy Kurniawan, 2017). KPU mencatat, berdasarkan pemberitaan sebuah media, pasangan hasil koalisi campur cenderung memenangi pilkada: 69,73 persen pada 2015 dan 66,67 persen pada 2017. Maka dari itu, dinamika koalisi antara partai politik satu dengan yang lainnya di tingkat lokal cenderung lebih dinamis daripada di pusat walaupun keputusan atau restu koalisi di tingkat lokal bergantung pada pengurus pusat. Dilain hal, peta kondisi dan situasi politik di masing-masing daerah berbeda-beda dan hanya di pahami oleh pengurus cabang di tingkat lokal yang menyebabkan kewenangan pusat seperti mengurus pusat saja dan meminta laporan dari daerah. Akan menjadi pertanyaan besar juga apakah koalisi yang terbentuk akan mempengaruhi strategi yang diterapkan dalam memenangkan pertarungan di pilkada. Karena sejatinya dengan Indonesia yang mengenal sistem multi partai, koalisi yang terbentuk akan berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lain, sehingga juga memunculkan strategi pula dalam usaha mendapatkan suara di pemilu.

Selain itu, koalisi yang terjadi antara PDIP-PKB juga berhasil menumbangkan partai Golkar yang mengusung calonnya tanpa berkoalisi dengan partai politik lain. Pada pilwalkot 2005 dan 2010 secara beruntun pilkada kota Pekalongan dimenangkan oleh partai Golkar tanpa berkoalisi tanpa partai politik lain juga. Bahkan dominasi partai Golkar di Kota Pekalongan juga sampai ranah legislatif. Pada periode DPRD tahun 2009 dan 2014, partai Golkar menjadi partai dengan jumlah kursi terbanyak. Pada periode 2009-2014 jumlah kursi partai Golkar di DPRD Kota Pekalongan sebanyak 8 kursi dari total 30 kursi yang ada, sedangkan pada periode tahun 2014-2019 jumlah kursi partai Golkar mencapai 9 kursi dari total 30 kursi yang ada (Riyanto, 2016, p. 24).

Berdasarkan argumen-argumen di atas, menjadi menarik melihat bagaimana PDIP dan PKB berkoalisi dalam pemilihan kepala daerah Kota Pekalongan, dimana kedua partai tersebut memiliki basis ideologi dan basis massa yang berbeda. PDIP dengan kaum nasionalisnya, PKB dengan kaum religiusnya. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui jawaban atas dua rumusan masalah yakni bagaimana dinamika koalisi PDIP-PKB dan pengaruh koalisi PDIP-PKB terhadap strategi yang akan dilakukan dalam Pilkada Kota Pekalongan tahun 2015. Sebagai sebuah kajian ilmiah dan sesuai dengan prinsip penelitian, maka penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai, sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana dinamika koalisi di tingkat lokal serta fenomena-fenomena yang terjadi antara PDIP dan PKB dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Pekalongan tahun 2015.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi PDIP dan PKB berkoalisi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Pekalongan tahun 2015.
- c. Untuk mengetahui pengaruh koalisi yang terbentuk terhadap strategi politik yang diterapkan PDIP dan PKB dalam memenangkan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Pekalongan tahun 2015.

### **Dinamika Koalisi Partai Politik dengan Dua Basis Berbeda di Tingkat Lokal**

Fenomena koalisi antar partai politik memang sudah menjadi hal yang wajar dalam perpolitikan di Indonesia. Orientasi kekuasaan dan pragmatisme seakan menjadi hal yang dominan dalam pekan menuju pemilihan umum baik eksekutif maupun legislatif. Kecenderungan mereka terhadap ideologi atau paham yang mereka miliki akan menentukan bagaimana langkah koalisi yang dibentuk serta arah kebijakan pemerintah yang akan dibuat. Meskipun begitu, hal ini juga dirasa kurang melengkapi kondisi politik yang ada di Indonesia. Pasalnya, semua agenda politik di tingkat lokal seringkali belum mampu mendorong perubahan hal yang bersifat pragmatis menjadi ideologis

karena lemahnya pelembagaan partai di tingkat lokal (Asrinaldi, 2013). Argumen ini didukung dengan fakta yang terjadi pada masa-masa pra-pemilu, dimana menguatnya pragmatisme dalam pembentukan koalisi antar partai politik. Hal ini bisa saja terjadi karena beberapa faktor, antara lain, lemahnya pelembagaan partai, mahalnya biaya politik, *money* politik, popularitas seseorang, serta orientasi jabatan atau kekuasaan.

Koalisi yang terjadi di Indonesia bisa dipandang adalah hal yang wajar karena berdasarkan sistem kepartaian multi-partai yang berdampak pada kondisi dan situasi perpolitikan Indonesia. Tidak seperti sebelum zaman orde baru, kategorisasi partai politik masih dapat dilihat dengan sifat ideologis dan orientasi kebijakannya. Diketahui bahwa saat sebelum orde baru, kategori partai politik di Indonesia tergolong menjadi tiga, yakni, Nasionalis, Islam, dan Komunis. Tetapi pasca orde baru, di era reformasi orientasi ideologi dan kebijakan partai politik di Indonesia seakan-akan memudar dengan menguatnya pragmatisme di berbagai partai politik. Perubahan orientasi ini tentu saja berdampak terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Dalam era reformasi ini, seakan-akan ideologi serta figur seseorang hanya dijadikan sebagai barang dagangan semata-mata untuk mencapai kekuasaan (Makhasin, 2016, p. 238). Dari kedua pendekatan *office-seeking* dan *policy-seeking*, ada tipologi koalisi partai untuk menjelaskan model pembentukan koalisi antara partai politik yang ada di Indonesia. Tipologi ini didasarkan atas dua hal yaitu ukuran atau keanggotaan dan orientasinya atas kekuasaan (Makhasin, 2016, p. 239). Dilihat dari sudut pandang ukuran atau keanggotaan, koalisi terdiri dari kecil dan besar, sedangkan apabila dilihat dari sudut pandang orientasi atas kekuasaan, partai politik yang ada di Indonesia terbagi menjadi dua, yakni partai ideologis dan pragmatis. Dari pola koalisi partai politik yang sudah dijelaskan diatas, maka terdapat empat tipe pembentukan koalisi yaitu koalisi kecil-ideologis, koalisi besar-ideologis, koalisi kecil-pragmatis, serta koalisi besar-pragmatis. Terdapat beberapa indikator dalam menentukan apakah koalisi yang terjadi antar partai politik masuk dalam salah satu jenis koalisinya.

Tabel 1.3  
Tipologi Koalisi Partai Politik

Orientasi Kebijakan	Ukuran atau Keanggotaan	
	Kecil	Besar
Ideologis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gabungan suara &lt;30% dan atau partai pendukung ≤3.</li> <li>• Satu garis dalam identitas ideologi dan atau orientasi kebijakan.</li> <li>• Satu partai dominan dalam pemimpin koalisi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gabungan suara &gt;30% dan atau partai pendukung &gt;3.</li> <li>• Satu garis dalam identitas ideologi dan atau orientasi kebijakan.</li> <li>• Satu partai dominan dalam pemimpin koalisi.</li> </ul>
Pragmatis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gabungan suara &lt;30% dan atau partai pendukung ≤3.</li> <li>• Lintas ideologi dan orientasi kebijakan.</li> <li>• Tidak ada partai yang dominan.</li> <li>• Adanya figur struktural atau non struktural partai sebagai sponsor atau penyanggah dana.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gabungan suara &gt;30% dan atau partai politik.</li> <li>• Lintas ideologi dan orientasi kebijakan.</li> <li>• Tidak ada partai yang dominan.</li> <li>• Adanya figur kuat non struktural partai sebagai</li> </ul>

		sponsor atau penyandang dana.
--	--	-------------------------------

Sumber : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 19, No.3, 234-250 (Makhasin, 2016)

Dari tabel tipologi koalisi partai politik diatas, maka akan memudahkan penulis untuk mengkaji serta menganalisa bagaimana model pembentukan koalisi antara PDIP dan PKB dalam kemenangan pasangan H. Achmad Alf Arslan Djunaid, SE dan H.M Saelany Mahfudz, SE di Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Pekalongan tahun 2015.

### **Pengaruh Koalisi terhadap Strategi**

Koalisi antar Partai Politik yang terjadi akan memengaruhi strategi yang akan dijalankan. Pengaruh koalisi terhadap strategi juga tidak lepas dari figur yang akan dicalonkan atau diusung oleh partai politik atau koalisi partai politik. Hal ini terbukti dengan riset yang dilakukan oleh Saiful Muljani Research & Consulting (SMRC) menyebutkan bahwa kekuatan figur calon menentukan strategi dan kemenangan dalam pilkada (Bintoro Agung, 2018). Pada pemilihan gubernur tahun 2018, daerah Jawa Barat, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan menunjukkan pola yang mirip yakni faktor figur mengalahkan basis pemilih koalisi partai politik dengan didukung oleh parpol yang memiliki dukungan lebih sedikit. Hal ini ditambah dengan syarat bagaimana melihat serta menilai bagaimana individu atau calon ditentukan. Seperti yang disampaikan dalam bukunya Peter Schroder tentang Strategi Politik dimana secara *marketing*, politik juga sama halnya dengan bisnis dimana kesuksesan atau keberhasilan dalam memenangkan pilkada juga dibutuhkan penawaran produk yang baik dan sesuai keinginan masyarakat, antara lain berupa profil, individu, program, kompetensi, dan kinerja (Schroder, 2010, p. 97). Dalam poin individu, peran individu akan sangat dominan dalam suatu pemilu langsung di daerah pemilihan. Dalam hal ini, individu atau orang yang bersangkutan seringkali memegang peranan yang penting baik dalam pembuatan produk, atau peran kelompok-kelompok lain yang berada dibawahnya (Schroder, 2010, p. 101). Terdapat tiga indikator dalam menentukan dan menilai calon, antara lain adalah tingkat popularitas, citra dan penerimaan/dukungan internal (Schroder, 2010, pp. 102–104). Oleh karena itu, koalisi yang terbentuk akan sangat berpengaruh terhadap strateginya, dalam hal ini dalam kampanye pemilihan umum. Strategi kampanye sendiri merupakan bentuk khusus dari strategi politik (Schroder, 2010, p. 29). Tujuannya bukan lain adalah untuk mendapatkan kekuasaan serta dapat mengisi posisi strategis yang memiliki kewenangan dalam hal pembuatan kebijakan yang mampu memberikan pengaruh terhadap masyarakat dan perubahan pola pikir masyarakat yang bersifat radikal.

Strategi kampanye dalam pemilu terkadang dipandang oleh masyarakat merupakan hal yang buruk, bahkan hal ini diamini oleh politisi atau partai politiknya sendiri. Seiring dengan realita yang terjadi di Indonesia khususnya dalam pemilu di tingkat lokal, fenomena *black campaign* dan *money politic* menjadi faktor mengapa kampanye dipandang sebelah mata oleh beberapa pihak. Tetapi jika kita lihat dari sisi objektif, tentu saja kekuasaan adalah alat yang dipakai partai politik guna menerapkan kebijakan-kebijakannya. Apabila mereka tidak menduduki kekuasaan, maka konsep politik yang dipakai merupakan konsep dari pihak lain. Di sisi lain, saat-saat dimana menjelang pemilu, seringkali muncul kelompok kritis baik itu dari golongan intelektual, masyarakat maupun media. Baik adanya apabila kelompok kritis tersebut melakukan kritik terhadap penguasa yang bersifat substantif. Namun terkadang yang terjadi hal tersebut hanya dilakukan dalam usaha pemusatan kekuasaan oleh kubu oposisi. Hal ini malah berdampak negatif yang berujung pada pembodohan terhadap masyarakat. Banyaknya kepentingan pihak yang menumpang untuk mendongkrak kelompoknya menjadikan kritik yang dilontarkan terhadap pemerintah hanya sebagai alat.

Pertempuran memperebutkan kekuasaan ini akan berdampak buruk dan merugikan budaya politik apabila dijalankan tanpa konsep, tanpa strategi yang matang dan tanpa kerangka politik yang jelas. Alhasil tujuan tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk masyarakat. Berdasarkan pola strategi yang diperlukan, penulis menempatkan apakah partai politik menggunakan strategi ofensif ataupun strategi defensif di saat menjelang pemilu. Strategi ofensif dibagi menjadi dua menjadi strategi untuk memperluas pasar dan untuk menembus pasar. Sedangkan strategi defensif meliputi strategi untuk mempertahankan pasar serta menutup atau melepaskan pasar (Schroder, 2010,

p. 185). Strategi ofensif memperluas pasar, artinya adalah bagaimana partai politik mampu mengambil suara dari massa/pemilih dari partai pesaing. Tentunya hal ini didukung dengan memunculkan perbedaan yang tidak dimiliki oleh partai pesaing baik dalam kebijakan yang akan dilakukan maupun isu-isu strategis. Sedangkan strategi ofensif menembus pasar, bukanlah seperti memperluas pasar. Namun mengoptimalkan suara dari pemilih, misalnya tahun lalu di daerah A pemilih terdapat 40%, maka harus ada target untuk di daerah tersebut meningkat 50% di tahun berikutnya. Strategi defensif mempertahankan pasar, biasanya dilakukan oleh partai pemerintah, atau kubu petahana. Strategi ini menuntut untuk partai melakukan pemahaman dan penjagaan lebih terhadap pemilihnya yang telah memilih sebelumnya. Biasanya partai pesaing akan membuat perbedaan, dalam hal ini partai pemerintah akan berusaha untuk mengaburkan perbedaan (disinformasi). Strategi defensif melepaskan pasar, biasanya hal ini dilakukan untuk mengamankan kursi atau posisi strategis. Strategi ini memiliki dua arti, pertama partai ingin menyerah dan dalam keadaan tertentu untuk melebur dengan partai lain. Pada kasus pertama jarang sekali terjadi, yang akan sering dijumpai pada kasus kedua. Dimana yang terjadi di pemilu eksekutif, terjadinya putaran kedua untuk pemungutan suara kembali. Maka partai lain akan otomatis bergabung dengan dua kandidat yang memiliki suara terbanyak pada putaran pertama.

Pengaruh koalisi terhadap strategi yang dimaksud juga beberapa kali terjadi di Indonesia. Hal ini didukung dengan peristiwa Pemilihan Umum tahun 2014, terdapat dua koalisi yakni Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Adanya perpindahan partai politik dari kubu koalisi yang kalah pindah ke kubu koalisi pemerintahan. Hal ini tentu saja dapat diambil sebagai kecenderungan pragmatis dalam koalisi partai politik yang ada di Indonesia. Hal yang sama terjadi juga pada masa menjelang pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 ini, dimana Joko Widodo selaku presiden terpilih sekarang (2014-2019) sudah memilih pasangannya, yaitu Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), H. Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden di pemilu mendatang. Peneliti melihat ini sebagai strategi Jokowi "ofensif dan defensif". Jokowi sempat diserang oleh kubu oposisi sebagai anti-Islam, bertahannya adalah dengan memilih H. Ma'ruf Amin sebagai pasangannya di pilpres mendatang guna meredam suara-suara yang menyebut beliau sebagai anti-Islam (Setyo Aji, 2018). Di sisi lain, menyerang yang dimaksud adalah dalam pemilihan H. Ma'ruf Amin adalah untuk memperluas pasar terhadap kelompok/massa partai pesaing. Padahal sosok Ma'ruf Amin juga menjadi salah satu pelopor Aksi 212 dimana berhasil menuntut mantan Gubernur DKI Jakarta pak Basuki Cahya Purnama atau kerap disapa pak Ahok masuk penjara dalam kasus penistaan agama. Karena kita ketahui bahwa Joko Widodo diusung oleh PDIP dengan basis massanya yang nasionalis yang mencoba memasuki daerah lawan dengan memasukkan H. Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden.

## **Metode Penelitian**

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan desain penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus.

## **Pembahasan**

### **a. Dinamika Koalisi PDIP-PKB dalam Pilkada Kota Pekalongan tahun 2015**

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum walikota pekalongan tahun 2015 menjadi perjalanan panjang bagaimana koalisi PDIP-PKB Kota Pekalongan turut serta meramaikan pesta demokrasi di Pekalongan tahun 2015. Menurut ketentuannya, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partai politik datau gabungan partai politik yang menjadi peserta pemilu adalah yang memenuhi batas minimal 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pemilu legislatif daerah. Sesuai dengan komposisi DPRD Kota Pekalongan periode 2014-2019, PDIP memegang 4 kursi sedangkan PKB memiliki 3 kursi, sehingga apabila ditotal berjumlah 7 kursi. Jumlah tersebut telah memenuhi batas minimal 20% yaitu sebanyak 6 kursi. Berdasarkan hasil perbincangan oleh salah satu wartawan dengan sekretaris DPC PDIP Kota Pekalongan, bahwa PDIP dan PKB sudah resmi berkoalisi. Kedua partai politik tersebut menyadari bahwa belum memiliki tiket sehingga mau tidak

mau harus berkoalisi untuk mendapatkan tiket menuju pilkada. Kemudian daripada itu, beliau juga menyebutkan bahwa visi-misi dan kultur yang hampir sama antar kedua partai menjadi salah satu faktor pendukung mengapa kedua partai politik ini berkoalisi (M. Ainul Atho', 2015). Faktor tersebut di dukung dengan kondisi kedua partai politik di tataran pusat menjalani komunikasi yang baik sehingga hanya membutuhkan sedikit penyesuaian untuk mengeluarkan rekomendasi politik dari pusat ke daerah.

Beberapa faktor di atas hanyalah bersifat administratif. Terdapat faktor lain mengapa PDIP-PKB berkoalisi, yakni faktor sejarah. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketua DPC PDIP dan sekretaris DPC PKB, mereka tidak menafikan bahwa faktor utama selain administratif adalah sesuatu yang bersifat historis. Jadi mereka berpendapat bahwa dalam kontestasi politik di Indonesia, kekuatan partai nasionalis dan religius ketika bergabung memiliki kekuatan yang besar. Hal ini didukung juga dengan semua kekuatan yang dimiliki dalam menjalankan strategi. Untuk bisa mengalahkan kekuatan Golkar di Kota Pekalongan dengan bukti bahwa partai tersebut bisa mengusung calonnya secara tunggal tanpa berkoalisi dibutuhkannya kekuatan partai Nasionalis dan dari sisi Religius. Namun dari sisi orientasi atas kekuasaan, selain PDIP dan PKB memiliki basis massa yang berbeda, kedua partai tersebut juga memiliki landasan ideologi yang berbeda. Salah satu indikator dalam tipologi koalisi partai politik, koalisi ideologis atau pragmatis dinilai berdasarkan berada dalam satu garis identitas ideologis atau orientasi kebijakan. Perbedaan ideologis sudah jelas terlihat, maka terpenuhi indikator koalisi PDIP-PKB termasuk dalam golongan Koalisi Kecil Pragmatis (KKP).

Komunikasi yang terjadi antar kedua partai politik untuk berkoalisi sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Bahkan ketua DPC PKB Kota Pekalongan Jecky Zam Zami menyebutkan bahwa pada pilkada 2015 ini bukanlah hal yang main-main dan siapapun calonnya harus loyal kepada partai pengusung. Kekuatan kedua partai politik terlihat dalam komunikasi yang terjalin. Beliau juga mengatakan bahwa keputusan resmi bahwa PDIP dan PKB berkoalisi terjadi saat bulan Ramadhan yang diharapkan beliau membawa keberkahan saat proses pilkada berlangsung. Dalam wawancara peneliti dengan narasumber, komunikasi yang dilakukan antara elit dan anggota yang di bawah hanya bersifat teknis. Artinya keputusan-keputusan atau kebijakan yang diambil hanya melibatkan elit saja. Kesadaran struktural dipaksakan untuk tidak mengusik keputusan para elit. Hal ini memiliki kecenderungan pragmatis dalam memutuskan kebijakan. Proses-proses yang terjadi tidak melibatkan seluruh anggota.

Berdasarkan pengumuman KPU No. 593/KPU-Kota-012.329543/VIII/2015 tentang Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan tahun 2015 menyebutkan bahwa pasangan Alex-Sae merupakan pasangan calon dengan penerimaan awal dana kampanye tertinggi daripada pasangan calon (paslon) yang lain. Alex-Sae memiliki penerimaan dana kampanye sebesar Rp 181.770.000, kemudian paslon nomor urut 2 Heri-Tulis sebesar Rp 21.000.000, dan paslon nomor urut 3 Hakam-NurChasanah memiliki penerimaan dana kampanye terendah yakni hanya sebesar Rp 3.100.000. Diketahui dari pengumuman KPU laporan dana awal kampanye, pasangan calon nomor urut 1 Alex-Sae penerimaan sebesar Rp 181.770.000 berasal hanya dari pasangan calon. Kemudian daripada itu, dalam mekanisme yang diseleranggakan KPU Kota Pekalongan mengharuskan adanya proses setelah diterimanya Laporan Awal Dana Kampanye (LADK). Proses setelah itu adalah diserahkannya berkas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan terakhir setelah masa kampanye yakni Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Dalam dokumen KPU Kota Pekalongan, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dari Tim Gabungan Partai Politik PDIP dan PKB mencantumkan bahwa sumbangan hanya berasal Pak Alex yang menyumbang sebesar Rp 53.435.600, dan tidak ada sama sekali sumbangan yang berasal dari pak Sae selaku wakil maupun dari kedua partai politik pengusung yang berkoalisi yakni PDIP dan PKB.

Dari berkas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dapat dilihat bahwa seluruh dana kampanye di keluarkan oleh Pak Alex. Dilihat dari sisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) memang tidak menyalahi aturan, namun apabila dilihat dari teori tipologi koalisi partai politik menjelaskan bagaimana koalisi kecil ideologis (KKI), koalisi kecil pragmatis (KKP),

koalisi besar ideologis (KBK), dan koalisi besar pragmatis (KBP) akan dapat menangkap sesuatu yang berbeda. Berdasarkan indikatornya, terdapat salah satu indikator yang membedakan koalisi tersebut bisa dikatakan sebagai koalisi yang ideologis atau koalisi yang cenderung pragmatis. Indikator tersebut adalah apakah terdapat figur kuat struktural/non struktural atau tidak. Terlihat jelas bahwa dokumen yang dimiliki oleh KPU Kota Pekalongan dari Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan (LPSDK), serta Laporan Penerimaan dan Pengeluaran (LPPDK) dari Tim Gabungan Partai Politik PDIP-PKB Pasangan Alex-Sae hanya berjumlah Rp 266.205.600. Sedangkan jawaban Pak Maftoechin berkata hanya untuk pilkada Kota Pekalongan saja 15 M dan itu hanya untuk persiapannya saja. Dan secara tidak langsung Pak Alex itu sendiri menjadi figur struktural yang kuat sebagai penyandang dana terbanyak dalam koalisi. Dalam indikator yang ada dalam koalisi kecil pragmatis, terdapat salah satu kategori yang masuk dalam kelompok itu yakni adanya figur kuat struktural atau non-struktural partai sebagai sponsor atau penyandang dana. Dominasi pak Alex sebagai sumber dana kampanye menjadi salah satu fakta bahwa koalisi PDIP-PKB Pekalongan menjadikan koalisi PDIP-PKB masuk ke dalam golongan Koalisi Kecil Pragmatis (KKP).

Pasangan calon Alex-Sae menjadi pertarungan besar pilkada saat itu. Karena pasangan pak Alf Arslan Djunaid-Saelany Mahfudz adalah cucu orang besar di Pekalongan. Alf Arslan Djunaid atau yang lebih kerap disapa Pak Alex ini merupakan cucu dari pendiri Kospin Jasa, Djunaid yang lebih dikenal masyarakat. Sedangkan pak Saelany Mahfudz merupakan cucu dari pendiri pondok pesantren terbesar di Pekalongan yakni pondok pesantren Ribatul Muta'allimin, KH Saelan (Raka F Pujangga, 2015). Alf Arslan Djunaid (Alex) merupakan hasil dari penjarangan yang dilakukan oleh PDIP terhadap bakal calon walikota (bacawalkot). Bersama dengan Cuntho Witjaksana, mereka berdua dipersyaratkan untuk membawa masuk mitra koalisi. Siapa yang berhasil maka akan menjadi bahan laporan rekomendasi dari DPC kepada DPD dan DPP (M. Ainul Atho', 2015). Pada proses penentuan pasangan calon adalah keputusan internal partai atau gabungan partai politik. Namun bisa ditelaah bahwa dalam proses penentuan pasangan calon juga terdapat faktor eksternal yang dapat mempengaruhi hasil keputusan rekomendasi nama pasangan calon yang akan diusung dalam pilkada tersebut. Benar adanya bahwa kekuatan individu yang memiliki modal sosial, modal politik serta modal finansial sangat berpengaruh dalam proses penentuan pasangan calon. Sekretaris PDIP Kota Pekalongan menyebutkan bahwa dalam proses penjarangan kader, terdapat dua nama sebagai bakal calon walikota (bacawalkot), antara lain adalah Cuntho Witjaksana dan Alf Arslan Djunaid. Lalu partai akan melaporkan nama yang akan disampaikan dari DPC ke DPD dan DPP dengan syarat mampu menggaet mitra koalisi demi memenuhi persyaratan ambang batas pemilu. Alhasil pak Alf Arslan Djunaid atau Alex inilah yang direkomendasikan sebagai calon walikota Pekalongan pada pilkada tahun 2015. Dan dalam perjalanannya PDIP yang akan memegang posisi calon walikota, sedangkan untuk calon wakil walikota akan diserahkan kepada mitra koalisi atau atas dasar calon walikota yang direkomendasikan yang memiliki kewenangan untuk memilih pasangannya.

Berbeda dengan PKB, PKB sendiri memutuskan berkoalisi dengan PDIP karena memang ajakan oleh Pak Alex sendiri. Hal ini didukung dengan berita dari radar pekalongan yang menyebutkan antara kedua calon yang telah melalui proses penjarangan tersebut diwajibkan membawa satu mitra koalisi (M. Ainul Atho', 2015). Dan ternyata yang lolos adalah pak Alex. Kemudian selain itu, PKB sendiri juga mengambil keputusan untuk berkoalisi dengan PDIP juga berdasarkan oleh restu dari Santri NU dan diketahui bahwa bapak Saelany Mahfud merupakan orang NU. Selain itu, NU juga menjadi tambahan mesin politik secara non struktural bagi PKB. Hubungan antara PKB dan NU sudah menjadi alasan mengapa PKB menjadi salah satu partai basis massa yang cukup kuat di kota Pekalongan.

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Pekalongan pada tahun 2015 memiliki 3 kandidat yang diusung partai maupun gabungan partai politik di antaranya ada Koalisi PDIP-PKB, Partai Golkar, dan Koalisi PAN-Gerindra. Dalam kasus pilkada tingkat kabupaten atau kota, koalisi yang terbentuk biasanya bersifat sementara yang memiliki kecenderungan pragmatis dalam usaha mendapatkan kekuasaan. Pragmatisme koalisi yang terbentuk dalam pilkada di daerah merupakan dampak sistem pemilu, dimana partai boleh mengusung calon walikota atau bupati dengan syarat



minimal memiliki 20% suara sah, dan untuk partai yang tidak memenuhi kuota tersebut dapat membentuk koalisi dengan partai politik yang lain. Dan dalam koalisi PDIP-PKB yang terjadi di pilkada Kota Pekalongan pada tahun 2015 bisa jadi tidak berkoalisi pada tahun 2020 nanti. Hal ini yang menjadi dasar mengapa sub bab ini perlu dijelaskan mengapa koalisi yang terjadi secara struktur bergabung, namun dalam pelaksanaannya terpisah.

Berdasarkan data dapat diamati bahwa penentuan lima tahun kedepan ini, dapat dilihat proses pemerintahan dan dinamika politik yang akan terjadi di kemudian hari yang memungkinkan koalisi PDIP-PKB bisa saja terpisah maupun kembali bersatu. Hal ini juga menjadi salah satu dasar mengapa koalisi secara pelaksanaan strategi terpisah karena dengan membagi tugas, maka diharapkan maksud kampanye oleh pasangan calon bisa menyeluruh ke semua daerah. Namun apabila bisa dilihat dari kacamata lain, maksud pernyataan terdapat adanya *leader* di utara dan selatan Kota Pekalongan bisa jadi terdapat daerah kekuasaan yang perlu dijaga sehingga dimungkinkan PKB dan PDIP tidak berbentrok saat menjalankan strategi kampanye, serta menggunakan pendekatan yang berbeda tergantung dari massa masing-masing daerah.

Secara *marketing*, politik juga sama halnya dengan bisnis dimana kesuksesan atau keberhasilan dalam memenangkan pilkada juga dibutuhkan penawaran produk yang baik dan sesuai keinginan masyarakat, antara lain berupa profil, individu, program, kompetensi, dan kinerja (Schroder, 2010, p. 97). Dalam poin individu, peran individu akan sangat dominan dalam suatu pemilu langsung di daerah pemilihan. Dalam hal ini, individu atau orang yang bersangkutan seringkali memegang peranan yang penting baik dalam pembuatan produk, atau peran kelompok-kelompok lain yang berada dibawahnya (Schroder, 2010, p. 101). Terdapat tiga indikator dalam menentukan dan menilai calon, antara lain adalah tingkat popularitas, citra dan penerimaan/dukungan internal (Schroder, 2010, pp. 102–104). Pada kasus koalisi PDIP-PKB kota Pekalongan dalam pilkada kota Pekalongan tahun 2015, khususnya Pak Alex memiliki kriteria yang sudah mencakup ketiga indikator di atas. Penerimaan/dukungan internal juga telah dimiliki oleh pak Alex sebagai calon walikota yang direkomendasikan dari PDIP kota Pekalongan. Untuk dapat memperoleh surat rekomendasi DPP PDIP, dari kedua kandidat dari hasil penjangkaran PDIP kota Pekalongan wajib menggaet satu mitra koalisi, dan ternyata yang lolos dan mendapat rekomendasi dari DPP PDIP adalah pak Alex (M. Ainul Atho', 2015). Dari pembahasan di atas, menarik sekali saat melihat koalisi terbentuk karena kekuatan individu. Dalam hal ini individu atau pak Alex adalah orang yang memegang peranan paling penting dalam terbentuknya koalisi PDIP-PKB. Berdasarkan proses dan dinamika yang terjadi, dalam proses ini koalisi terbentuk setelah calon terpilih. Kekuatan pak Alex yang memegang peranan penting dalam koalisi ini menjadi bukti bahwa kekuatan figur struktural sangat terlihat jelas. Berdasarkan hal tersebut, koalisi yang terbentuk dalam gabungan partai politik antara PDIP dan PKB dalam Pilwalkot Pekalongan tahun 2015 di pengaruhi oleh kekuatan individu atau calonnya. Koalisi yang terbentuk karena kekuatan individu ini memiliki kecenderungan pragmatis karena partai politik hanya dianggap sebagai kendaraan atau mesin politik saja.

Penulis mengatakan bahwa posisi tawar PDIP sedikit lebih tinggi ketimbang PKB. Terdapat dua poin yang menjadi dasar mengapa PDIP memiliki posisi tawar yang lebih tinggi. Pertama adalah terkait dengan adanya penjangkaran yang dilakukan oleh kubu PDIP, hingga dikeluarkannya rekomendasi untuk pak Alex yang memiliki popularitas karena beliau yang sebelumnya menjabat sebagai wakil walikota Pak Basyir periode 2009-2014. Diketahui bahwa syarat untuk mendapatkan rekomendasi dari PDIP adalah mampu menggaet mitra untuk berkoalisi (M. Ainul Atho', 2015). Pak Alex pun mampu menarik PKB untuk berkoalisi dengan PDIP. Faktor kedua mengapa PDIP memiliki posisi tawar yang lebih dalam koalisi adalah dengan adanya komunikasi politik yang dilakukan oleh kubu PDIP dalam usaha mencari wakil untuk pak Alex. Disebutkan bahwa munculnya nama Pak Saelany sebagai pasangan Pak Alex juga merupakan hasil dari komunikasi yang dilakukan oleh bu Titiek pada waktu itu. Bu Titiek melakukan komunikasi terhadap pak Sae. Namun terjadi perbedaan yang cukup jelas antara pernyataan bu Titiek bahwa keluarga pak Alex juga mengarah ke pak Sae dengan jawaban pak Maftoechin.

## **b. Strategi Politik PDIP-PKB dalam Pilwalkot Pekalongan tahun 2015**

Pada sub bab ini peneliti mencoba menjelaskan bagaimana mesin politik koalisi baik dari partai maupun calon bekerja. Tentu saja mesin politik menjadi ujung tombak bagaimana koalisi ini menjalankan strateginya dalam mendapatkan suara, baik dalam mempengaruhi massa maupun membangun massa. Kekuatan PDIP dan PKB sebagai partai yang berbeda kelompok dari kelompok yang nasionalis dan NU menjadi kekuatan politik guna menumbangkan dominasi Golkar di Kota Pekalongan. Koalisi dari partai dengan basis massa nasionalis dan religius dianggap sebagai kekuatan yang bisa menumbangkan dominasi partai Golkar di Kota Pekalongan. Hal ini terbukti pada hasil penghitungan suara pada pemilihan umum walikota Pekalongan tahun 2015 yang dimenangkan oleh koalisi PDIP dan PKB dengan pasangan calon Pak Alex-Sae dan berhasil mengalahkan Golkar yang mengusung Heri-Sutarip dengan selisih 8,74% atau sebanyak 13.401 suara. Selain mampu membawa nama dua kelompok (nasionalis dan religius) menjadi satu, mesin politik koalisi juga tidak hanya mengandalkan stuktur dari partai saja, namun dari calon itu sendiri yaitu pak Alex-Sae juga memiliki mesin sendiri. Kekuatan individu pak Alex semakin terlihat bahwa modal finansial dan modal sosial telah dimiliki. Dengan memiliki tim sukses dari keluarga dan teman-temannya sendiri menunjukkan bahwa pak Alex mempersiapkan segalanya untuk memenangkan kursi walikota Pekalongan tersebut. Ditambah dengan kekuatan NU yang bisa dibilang besar di Pekalongan, menjadikan mesin politik yang ada mampu mengalahkan partai Golkar dalam penyelenggaraan pilwalkot pada tahun 2015.

Yang dimaksud dengan strategi kearifan lokal oleh pak Maftoehin adalah upaya yang dilakukan dengan memperkuat pengaruh di desa-desa atau kelurahan-kelurahan yang memiliki pengaruh besar per kecamatan. Artinya penyebaran pengaruh dan pemahaman untuk memilih pak Alex-Sae dilakukan dengan mengidentifikasi karakter penduduk tiap daerah. Tidak hanya itu, namun dalam koalisi yang terjadi juga terdapat pembagian tugas yang berbeda dalam memaksimalkan di daerah kiranya itu milik PDIP atau PKB. Strategi tersebut ternyata tidak hanya hanya dalam teknis kampanye saja, namun pasangan Alex-Sae membawa konsep “Brayan Urip”. Konsep ini dijanjikan beliau dengan tujuan mensejahterakan masyarakat kota Pekalongan. Konsep ini dibawa mengingat kota Pekalongan memiliki keberagaman baik dari suku, ras maupun agama. Konsep ini sendiri memiliki tiga nilai pokok antara lain keadilan, kebersamaan, dan proporsional (Muhammad Irsyam Faiz, 2017). Konsep ini dilakukan dengan mengundang masyarakat untuk berkumpul pada hari Jumat tiap dua minggu sekali. Selain konsep brayan urip tersebut terdapat beberapa isu yang dipakai dalam rangka memaksimalkan perolehan suara. Dua isu tersebut adalah isu mengenai pengembalian logo yang pada kepemimpinan walikota pak Basyir dan pengembalian kelurahan yang telah di gabung. Koalisi saat itu memandang bahwa kebutuhan atau keinginan masyarakat pada saat itu adalah isu yang hangat untuk digoreng atau dimunculkan ke permukaan. Akhirnya dua isu itulah yang selalu di munculkan. Melihat itu juga salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pak Basyir yang berasal dari partai Golkar. Strategi yang dilakukan koalisi PDIP-PKB juga tidak hanya melibatkan struktur partai namun juga tim sukses dari pasangan calon itu sendiri. Dalam perjalanannya, terdapat isu yang sempat menyerang. Isu tersebut ditujukan kepada pak Alex, namun dari tim pemenangan sendiri mampu menyikapi isu dengan baik seperti yang di kemukakan bu Titiek agar untuk tidak terpengaruh dengan isu yang memecah belah dan tetap solid. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dianalisis bahwa strategi yang diterapkan oleh koalisi PDIP-PKB secara tidak langsung merujuk terhadap strategi ofensif memperluas pasar. Dimana tujuan yang diharapkan dengan adanya koalisi PDIP dan PKB dengan mengusung Pak Alex-Sae adalah untuk memenangkan kontestasi Pilkada Kota Pekalongan tahun 2015. Usaha yang dilakukan oleh koalisi PDIP-PKB adalah dalam rangka merebut dominasi partai Golkar di Kota Pekalongan yang dalam dua periode sebelumnya memenangkan pilkada dan memegang kursi paling banyak di DPRD Kota Pekalongan periode 2014-2019 dengan 9 kursi dan 8 kursi pada DPRD periode 2009-2014 (Riyanto, 2016, p. 24).

### **c. Pengaruh Koalisi terhadap Strategi**

Pada sub bab ini peneliti akan menjelaskan bagaimana koalisi yang terbentuk antara PDIP dan PKB akan mampu mempengaruhi strategi dalam pemilukada kota Pekalongan tahun 2015. Tentunya koalisi dan strategi akan sangat berkaitan dalam kontestasi politik khususnya pilkada di Indonesia. Kekuatan partai politik di daerah juga beragam, dan berbeda dengan ada yang dipusat. Hal ini

memungkinkan juga koalisi antar partai politik yang terbentuk juga tidak mengikuti koalisi yang ada di tingkat pusat. Fenomena juga ini juga merupakan dampak dari sistem pemilu yang ada di Indonesia. Sistem pemilihan umum di Indonesia sendiri berdasarkan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA) secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Penyelenggaraan pilkada yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara Pilkada yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Menurut UU Nomor 7 tahun 2017 pasal 222 tentang pemilu bahwa dalam penyelenggaraan pilkada serentak Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Kebijakan tersebut otomatis merubah juga dinamika politik yang berada di tingkat lokal/daerah. Koalisi yang terbentuk juga akan menggiring pemikiran elit di daerah bagaimana bisa bertahan adalah suatu langkah yang harus ditempuh. Alhasil koalisi partai politik di daerah akan berbeda dengan koalisi di tingkat pusat.

Dalam penelitian ini koalisi yang terbentuk antara PDIP dan PKB Kota Pekalongan peneliti mencoba menjawab pertanyaan berdasarkan analisis teori dengan fenomena yang terjadi di lapangan. Berdasarkan data yang ada, peneliti menemukan bahwa koalisi yang terjadi antara PDIP dan PKB mempengaruhi strategi yang ada. Peneliti melihat bahwa strategi yang digunakan adalah strategi ofensif memperluas pasar dimana strategi ini berusaha untuk mengambil suara yang ada di partai atau koalisi pesaing. Berdasarkan hasil wawancara juga mendapatkan jawaban bahwa strategi yang dilakukan oleh PDIP dan PKB mengusung pasangan calon Pak Alex-Sae bahwa mereka berusaha untuk menumbangkan Golkar yang sebelumnya memenangi pilkada kota Pekalongan selama dua periode secara beruntun. Walaupun partai Golkar bukanlah petahana pada pilkada tahun 2015, namun kekuatan partai Golkar di Kota Pekalongan tidak bisa diremehkan. Partai Golkar mampu mengusung calonnya sendiri karena memiliki 9 kursi di DPRD yang membuat partai Golkar partai dengan jumlah kursi paling banyak di DPRD Kota Pekalongan.

Strategi memperluas pasar yang dimaksud didukung dengan adanya pak Alex yang memiliki popularitas dan modal finansial secara mumpuni. Popularitas pak Alex didapatkan karena dia menjabat sebagai wakil walikota Pekalongan dan merupakan cucu orang besar di Pekalongan dimana kakeknya adalah pendiri kospin jasa dan rumah sakit Djunaid di Pekalongan. Sebagai partai pengusung PDIP dan PKB melihat bahwa kekuatan pak Alex mampu menembus pasar atau massa partai Golkar. Hal ini juga didukung dengan adanya konflik yang terjadi dalam internal partai Golkar itu sendiri pada tingkat nasional dimana terbaginya partai Golkar menjadi dua kubu, yakni kubu Abu Rizal Bakri dengan kubu Agung Laksono. Dalam proses pendaftaran pasangan Dr. Heri Wibawa, M.Kes-Ir. Sutarip Tulis Widodo diusung partai Golkar cukup menegangkan. Pasalnya, meski sudah ada kesepakatan dari partai Golkar pusat baik dari kubu Abu Rizal Bakri maupun Agung Laksono telah memutuskan pasangan calon itu, namun ditingkat bawah DPD Golkar Kota Pekalongan kubu Agung Laksono dengan ketuanya HM. Bowo Leksono, AhT., SH., MM., belum menandatangani, sehingga KPU Kota Pekalongan sempat mengembalikan berkas untuk dilengkapi walaupun kemudian ketua DPD Golkar Pekalongan kubu Agung Laksono yaitu Bowo Leksono langsung datang ke KPU Kota Pekalongan dan menyatakan jika pihaknya telah menandatangani (Riyanto, 2016, p. 89). Selain strategi ofensif memperluas pasar, peneliti juga melihat bahwa strategi yang diterapkan adalah strategi defensif mempertahankan pasar. Hal ini disebabkan oleh dari kedua partai politik tersebut yakni PDIP dan PKB memiliki basis massa yang jelas. Dimana PDIP dengan basis massa nasionalisnya dan PKB dengan basis massa NUnya. Pak Maftoechin dan pak Sugeng selaku narasumber peneliti juga mengakui bahwa PDIP memiliki kelembagaan yang cukup bagus di Pekalongan dimana pemberdayaan dan *maintenance* internal terlihat baik. Sedangkan kekuatan jaringan NU di Pekalongan bisa dibilang cukup besar yang tersebar di berbagai lapisan masyarakat. Dengan kekuatan dua kelompok basis massa tersebut menjadi kekuatan baru dalam pilkada kota Pekalongan tahun 2015 yang mampu menumbangkan Golkar.

## Penutup

Kesimpulan dari rumusan masalah apakah koalisi berpengaruh terhadap strategi yang dijalankan oleh PDIP-PKB dalam pemilukada kota Pekalongan tahun 2015 adalah berpengaruh. Hal ini disebabkan karena strategi ofensif memperluas pasar dan strategi defensif mempertahankan pasar adalah dampak dari terbentuknya koalisi PDIP-PKB. Kekuatan individu secara popularitas dan modal finansial menjadikan koalisi PDIP-PKB berusaha menumbangkan partai Golkar yang memiliki jumlah kursi terbanyak dalam DPRD Kota Pekalongan, serta mesin politik partai dan calon yang terstruktur dan sistematis. Kekuatan individu atau calon inilah yang dimanfaatkan koalisi PDIP-PKB dalam melakukan strategi ofensif memperluas pasar. Namun dalam strategi defensif mempertahankan tidak terlalu berpengaruh karena PDIP dan PKB juga memiliki basis massa yang jelas antara abangan dan NUnya.

Penelitian ini tidak lekang dari adanya kekurangan sehingga tidak dapat dikatakan sempurna. Demikian juga penelitian ini memiliki kekurangan yang disebabkan oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut adalah kesulitan mendapatkan informan inti, yakni pak Walikota. Faktor yang lain adalah keterbatasan waktu narasumber untuk dikonfirmasi untuk wawancara karena pada tahun 2019 ini sudah masuk pada tahap persiapan menjelang Pemilu kepala daerah kota Pekalongan di tahun 2020. Pada penelitian ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelemahan dalam penelitian ini adalah adanya hambatan pada penelitian berupa narasumber yang terlibat dalam koalisi PDIP-PKB pada proses penelitian sebagai narasumber primer atau utama yakni pak Alex telah wafat sehingga data yang didapat tidak maksimal. Walaupun analisis dalam penelitian ini tidak menyeluruh atau komprehensif namun penelitian dapat menjawab rumusan masalah yang ada, khususnya terhadap rumusan masalah bagaimana dinamika politik koalisi PDIP-PKB dalam Pemilukada kota Pekalongan tahun 2015. Maka dari itu, pada penelitian ini ingin menjelaskan serta menguji bagaimana klasifikasi koalisi PDIP-PKB, namun data yang diperoleh kurang menyeluruh sehingga dibutuhkan penelitian lanjutan pada penelitian ini yang sekaligus melengkapi kekurangan pada penelitian ini. Untuk partai politik, disarankan dalam mengikuti kontetasi politik di daerah seperti pilkada diharapkan mampu membuat koalisi yang berkelanjutan dan tidak pragmatis. Hal ini disebabkan karena adanya suara ketidakpercayaan pada masyarakat, sehingga menimbulkan citra partai politik menjadi buruk di mata masyarakat. Dan untuk pemerintah sendiri seharusnya mampu membuat sistem pemilu yang mampu mengurangi fenomena *money politics* sehingga sistem pemilu yang ada mampu menciptakan pemilu yang bersih dan sehat.

## Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada pihak – pihak yang telah menjadi narasumber dan responden didalam penelitian ini. Serta Mas Hendra Try Ardianto selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dalam proses penyusunan skripsi.

## Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (authorship), dan publikasi dari pihak manapun.

## Daftar Pustaka

### Buku :

- Arikunto, S. (2010). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Benoit, K., & Laver, M. (2006). *Party Policy in Western Democracies*.
- Cresswell, J. W. (2009). *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed* (3rd Ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, L. J. (1989). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Riyanto. (2016). *Potret Demokrasi Lokal Di Kota Batik Pekalongan : Inovasi Tangani Pilkada Serentak 2015*. Pekalongan: KPU Kota Pekalongan.

- Schroder, P. (2010). *Strategi Politik (Politische Strategien)* (3rd ed.; A. Agoesman, Ed.). Jakarta: Fredrich-Naumann-Stiftung fur die Freiheit.
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Yin, R. K. (2002). *Studi Kasus : Desain Dan Metode*. Jakarta: Rajagrafindo Persada

#### **Jurnal dan Artikel :**

- Arif, J. S. Al. (2014). Cara Pengasuhan Anak (Studi Deskriptif Masyarakat Nelayan di Kelurahan Kingking, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban). *AntroUnairDotNet*, 3(3), 85–108. Retrieved from <http://journal.unair.ac.id/AUN@cara-pengasuhan-anak-article-7993-media-134-category-8.html>
- Asa, K. (2006). *Batik Pekalongan dalam Lintasan Sejarah*. Pekalongan: Paguyuban Pecinta Batik Pekalongan.
- Asrinaldi. (2013). Koalisi Model Parlementer dan Dampaknya pada Penguatan Kelembagaan Sistem Presidensial di Indonesia. *Jurnal Penelitian Politik*, 10(2), 15. <https://doi.org/10.14203/JPP.V10I2.435>
- Basyar, M. H. (2004). Pemilih ” Hijau ” di Kota Santri : Kasus Pemilu 2004 di Pekalongan. *Jurnal Penelitian Politik*, 1(1), 49–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v1i1.373>
- Frendy Kurniawan. (2017). Koalisi Parpol di Pilkada Tak Selalu Segaris dengan Koalisi Pusat. Retrieved January 20, 2019, from tirto.id website: <https://tirto.id/koalisi-parpol-di-pilkada-tak-selalu-segaris-dengan-koalisi-pusat-czsY>
- I Gede D.E Adi Atma Dewantara, & Rudy, I. D. G. (n.d.). Implikasi Hukum Koalisi Partai Politik dalam Membentuk Pemerintahan yang Efektif. *Kertha Negara*, 04(01), 1–5.
- Idris, K. (2014). Koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan-Partai Kebangkitan Bangsa-Partai Amanat Nasional Dan Partai Keadilan Sejahtera Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010. *Journal of Politic and Government Studies*, 3(3), 1–10.
- Lucas, A. E. (1989). *Peristiwa Tiga Daerah : Revolusi dalam Revolusi*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Mahpudin, Hamid, A., & Dewi, S. K. (2018). Dinamika Koalisi Partai Politik dalam Pencalonan Kepala Daerah pada Pilkada Banten 2017. *Prosiding Seminar Nasional Prodi Ilmu Pemerintahan 2018*, 108–130. Retrieved from [http://repository.fisip-untirta.ac.id/956/1/naskah\\_9.pdf](http://repository.fisip-untirta.ac.id/956/1/naskah_9.pdf)
- Makhasin, L. (2016). Orientasi Ideologi dan Pragmatisme Politik Model Pembentukan Koalisi dalam Pilkada Serentak di Jawa Tengah 2015. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 19(3), 234–250.
- Purnama, A. A. D. (2014). Strategi Politik PDIP Dalam Pemenangan Pasangan Ganjar-Heru di Pilgub Jawa Tengah Tahun 2013. *Journal of Politic and Government Studies*, 3(2), 1–19.
- Situmorang, J. R. (2009). Beberapa Keterkaitan Antara Politik Dan Bisnis. *Jurnal Administrasi Bisnis Unpar*, 5(2), 146–159.
- Sumadinata, R. W. S. (2016). Dinamika Koalisi Partai-Partai Politik Di Indonesia Menjelang Dan Setelah Pemilihan Presiden Tahun 2014. *Jurnal Wacana Politik*, 1(2), 1–4.
- Waskitoadi, R. A. (2017). Jaringan Islam Tradisional Di Pekalongan : Respon Jaringan Terhadap Perubahan Sosial. *Satya Wacana University Press*, 33–62. Retrieved from <http://repository.uksw.edu/handle/123456789/14109>
- Wazni. (2013). Strategi Koalisi Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemenangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru 2010-2011. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Nakhoda*, 12(20), 141–148.
- Winasih, N. W. I., Erawan, I. K. P., & Bandiyah. (2016). Peran Partai Politik dan Kalkulasi Elit Terhadap Karakteristik Koalisi ( Studi Kasus : Pilkada Serentak di Kabupaten Karangasem dan Tabanan. *E-Journal Politika*, 1(1), 1–17.

#### **Website :**

- Bintoro Agung. (2018). Figur Cagub Dinilai Jadi Faktor Penentu dalam Pilkada. Retrieved August 26, 2019, from [cnnindonesia.com](https://www.cnnindonesia.com/pilkadaserentak/nasional/20180703212750-32-311239/figur-cagub-dinilai-jadi-faktor-penentu-dalam-pilkada?) website: <https://www.cnnindonesia.com/pilkadaserentak/nasional/20180703212750-32-311239/figur-cagub-dinilai-jadi-faktor-penentu-dalam-pilkada?>

- Christina Andhika Setyanti. (2015). Alasan Pekalongan Dipilih Jadi Kota Kreatif UNESCO. Retrieved May 24, 2019, from [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com) website: <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20150601110604-277-56910/alasan-pekalongan-dipilih-jadi-kota-kreatif-unesco>
- KPU Kota Pekalongan. (2015a). Akhirnya 4 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Daftar di Hari Terakhir Pendaftaran. Retrieved October 25, 2018, from [kpu-pekalongankota.go.id](http://kpu-pekalongankota.go.id) website: <http://kpu-pekalongankota.go.id/berita-121-akhirnya-4-pasangan-calon-walikota-dan-wakil-walikota-pekalongan-daftar-di-hari-terakhir-pendaftaran.html>
- KPU Kota Pekalongan. (2015b). REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PILWALKOT PEKALONGAN 2015. Retrieved October 31, 2018, from [kpu-pekalongankota.go.id](http://kpu-pekalongankota.go.id) website: <http://kpu-pekalongankota.go.id/berita-133-rekapitulasi-hasil-penghitungan-perolehan-suara-pilwalkot-pekalongan-2015.html>
- M. Ainul Atho'. (2015, June 1). Giliran PDIP-PKB Resmi Berkoalisi. *Issuu.Com*, p. 13. Retrieved from [https://issuu.com/radarpekalonganpaper/docs/radar\\_pekalongan\\_1\\_juni\\_2015/9](https://issuu.com/radarpekalonganpaper/docs/radar_pekalongan_1_juni_2015/9)
- Muhammad Irsyam Faiz. (2017). Mengenang Peninggalan Wali Kota Pekalongan, Konsep Brayon Urip. Retrieved July 17, 2019, from [nasional.tempo.co](http://nasional.tempo.co) website: <https://nasional.tempo.co/read/907501/mengenang-peninggalan-wali-kota-pekalongan-konsep-brayan-urip/full&view=ok>
- Raka F Pujangga. (2015). Pasangan Calon Alex Sae Jadi Pertaruhan Besar di Kota Pekalongan. Retrieved August 20, 2019, from [jatengt.tribunnews.com](http://jatengt.tribunnews.com) website: <https://jateng.tribunnews.com/2015/08/21/pasangan-calon-alex-sae-jadi-pertaruhan-besar-di-kota-pekalongan>
- Setyo Aji. (2018). Blusukan Ma'ruf Amin dan Strategi Kapitalisasi Suara Santri. Retrieved November 27, 2018, from [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com) website: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180906111801-32-328117/blusukan-maruf-amin-dan-strategi-kapitalisasi-suara-santri>
- Suryono. (2017). Saelany Machfudz Dilantik Sebagai Wali Kota Pekalongan. Retrieved October 26, 2018, from [daerah.sindonews.com](http://daerah.sindonews.com) website: <https://daerah.sindonews.com/read/1258772/22/saelany-machfudz-dilantik-sebagai-wali-kota-pekalongan-1511092414>

## Daftar Narasumber

- Titiek Restuningsih, Ketua DPC PDIP Kota Pekalongan dan Dewan Pembina Gabungan Partai Politik PDIP dan PKB, 30 Juli 2019, pukul 19.00 WIB.
- Maftoechin, Sekretaris Umum DPC PKB Kota Pekalongan dan Bendaraha Gabungan Partai Politik PDIP dan PKB, 30 Juli 2019, pukul 11.00 WIB.
- Sugeng, Tim Inti Kampanye, 4 Agustus 2019, pukul 15.00 WIB.
- Guruh Krisnamukti, Warga Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan, 16 Agustus 2019, pukul 16.30 WIB.
- Prasetya Dian Kuncoro, Warga Kelurahan Poncol Kecamatan Pekalongan Timur, 16 Agustus 2019, pukul 15.00 WIB.
- Ardi Pratama, Warga Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat, 16 Agustus 2019, pukul 19.30 WIB.

## Tentang Penulis

Yosef Evan Dinar Aditama adalah mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Penulis memiliki area riset seputar koalisi partai, strategi politik, dan pilkada.